

Kepemimpinan Kolaboratif dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan

Yunita Nur Fadilla¹⁾, Ismail Nurdin²⁾

^{1),2)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jalan Ir. Soekarno KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Email : yunitanurfadilla555@gmail.com

ABSTRACT

General elections (Pemilu) are a crucial democratic instrument for expressing the sovereignty of the people. Basic principles of elections, such as direct participation and fairness for all participants, reflect constitutional commitments to ensure a fair and transparent democratic process. Collaborative leadership is recognized as an approach that can strengthen the integrity and success of elections, enabling cooperation among various parties to achieve common goals. This research aims to explore the relationship between collaborative leadership and sustainable democracy in the 2024 elections in Indonesia. The method used in this research is literature study. The results of the discussion indicate that collaborative leadership plays an important role in encouraging active participation of the community, especially the younger generation, in elections. This leadership operates through cooperation among various election actors, including election organizers, political parties, and civil society, to achieve fair, transparent, and democratic elections. Sustainable democracy, on the other hand, supports elections by strengthening democratic institutions and promoting inclusive and transparent decision-making. Thus, it can be concluded that the integration of collaborative leadership and sustainable democracy is key to the success of the 2024 elections in Indonesia.

Keywords : Collaborative Leadership, Democracy, Elections Sustainable

ABSTRAK

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen demokratis yang krusial dalam mengekspresikan kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip dasar Pemilu, seperti partisipasi langsung dan keadilan bagi semua peserta, mencerminkan komitmen konstitusional dalam memastikan proses demokratis yang adil dan transparan. Kepemimpinan kolaboratif diakui sebagai pendekatan yang dapat memperkuat integritas dan keberhasilan Pemilu, memungkinkan kerja sama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi hubungan antara kepemimpinan kolaboratif dan demokrasi berkelanjutan dengan pemilu 2024 di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi literatur. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif memiliki peranan penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pemilu. Kepemimpinan ini beroperasi melalui kerjasama antara berbagai aktor pemilu, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk mencapai pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Demokrasi berkelanjutan, di sisi lain, mendukung pemilu dengan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan mempromosikan pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa integrasi antara kepemimpinan kolaboratif dan demokrasi berkelanjutan merupakan kunci untuk suksesnya pemilu 2024 di Indonesia.

Kata Kunci : Demokrasi Berkelanjutan, Kepemimpinan Kolaboratif, Pemilu

1. Pendahuluan

Pemilihan umum, atau yang biasa disebut pemilu, adalah salah satu instrumen demokratis yang digunakan untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat. Setiap lima tahun sekali, pemilu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip dasar yang meliputi partisipasi langsung, keterbukaan bagi seluruh warga negara, kebebasan dalam memberikan suara, penyelenggaraan yang rahasia, integritas dan transparansi dalam prosesnya, serta keadilan bagi semua peserta pemilu. Pemilu ini bertujuan untuk memilih para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Hamdani & Fauzia, 2021)

Pemilu merupakan tahap yang sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka yang akan memimpin pemerintahan. Tetapi, proses politik yang terkait dengan pemilu ini melibatkan kekuatan dan interaksi yang kompleks antara berbagai aktor politik. Dalam konteks Indonesia, pemilu memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas demokrasi serta menjalankan proses politik dengan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hasil pemilu akan menentukan pemimpin berikutnya yang akan memimpin negara, yang merupakan tujuan utama bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemajuan negara (Prabowo, 2020).

Pemilihan Umum pada dasarnya adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk menentukan arah pemerintahan, dan oleh karena itu, hampir semua negara yang menjalankan sistem demokratis di seluruh dunia menyelenggarakan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa transisi dan pergantian kekuasaan berlangsung dengan cara yang demokratis (Ramadhan, 2021).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, memiliki tugas dan wewenang yang mencakup penyusunan standar tata laksana pengawasan pemilu, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu, serta mencegah praktik politik uang. Bawaslu juga bertanggung jawab untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta mengelola laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan memiliki tugas menerima aduan dan laporan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. DKPP juga melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap aduan dan laporan tersebut, serta dapat memberikan sanksi kepada pelanggar kode etik. Masyarakat memiliki peran sebagai pemilih dan pengawas pemilu, sedangkan partai politik diharapkan berpartisipasi aktif dalam tahapan pemilu dan membantu sosialisasi aturan pemilu. Calon dan pasangan calon

memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Semua unsur ini berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam penyelenggaraan pemilu, peran utama atau pemain kunci terdiri dari KPU, Bawaslu, DKPP, TPP, masyarakat pemilih, partai politik, serta calon dan pasangan calon yang akan dipilih. Aktor-aktor ini memiliki peran yang sangat penting karena mereka bertindak sebagai pelaksana kebijakan pemilu dan memiliki dampak besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, peserta, dan pemilih, melainkan juga menjadi kepentingan banyak pihak dengan beragam latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Selain aktor utama, terdapat juga aktor pendukung atau sekunder yang turut berperan dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemilu (Supriyanto & Pratama, 2020).

Selama proses pemilihan umum, penting untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam suasana yang terbuka, di mana warga negara memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berkumpul. Dalam hal ini, hasil dari pemilihan umum yang diselenggarakan dengan transparansi dan kebebasan berekspresi dan berserikat dapat memberikan gambaran yang cukup akurat tentang partisipasi dan aspirasi masyarakat (Saleh, 2008).

Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum harus dilakukan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang memiliki sifat nasional, permanen, dan mandiri (Riadhussyah *et al.*, 2022). Hal ini menunjukkan komitmen konstitusional untuk memastikan pemilihan umum yang adil, transparan, dan demokratis sebagai prinsip dasar dalam proses demokrasi suatu negara.

Pemilu yang adil, transparan, dan demokratis menjadi landasan utama dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi suatu negara. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara efektif, pemilu dapat memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengungkapkan kehendak mereka secara bebas dan merasa yakin bahwa hasil pemilihan mencerminkan aspirasi mereka. Oleh karena itu, pasal konstitusional tersebut menciptakan kerangka kerja yang penting dalam menjaga integritas dan keberhasilan pemilu, terutama dalam konteks pemilu 2024 yang dianggap penting untuk arah politik dan masa depan negara tersebut.

Salah satu pendekatan kepemimpinan yang dapat memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan pemilu adalah kepemimpinan kolaboratif. Pada dasarnya, kepemimpinan dalam sebuah organisasi adalah suatu proses di mana seorang pemimpin mengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dengan tujuan mencapai tujuan organisasi (Tampubolon, 2018). Dimana keberhasilan seorang pemimpin yang baik tidak hanya diukur dari jumlah pengikutnya atau durasi kepemimpinannya, tetapi lebih pada kemampuannya menciptakan pemimpin baru (Marayasa *et al.*, 2020).

Kepemimpinan kolaboratif melibatkan kerja sama aktif antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan kolaboratif, yang diuraikan oleh (Siagian, 2015), merupakan keterampilan manajemen pemimpin yang selalu bekerja bersama dengan merancang kerjasama yang konstruktif dengan melibatkan berbagai pihak (stakeholder). Pemimpin kolaboratif juga bertanggung jawab memfasilitasi dan menjaga interaksi yang telah terjalin. Dalam kepemimpinan kolaboratif, keputusan seringkali diambil secara bersama-sama, dan pemimpinnya beroperasi dalam kerangka koalisi, kemitraan, dan aliansi. Penjelasan ini diperkuat dengan pernyataan Hill dalam (Suwatno, 2008) dimana kepemimpinan kolaboratif dalam sebuah kelompok melibatkan tingkat ketergantungan antara anggota dalam mengkoordinir aktivitas mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kelompok tidak hanya merupakan perkumpulan anggota semata, tetapi lebih merupakan entitas yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai kesepakatan dalam mencapai tujuan bersama.

Demokrasi sebagai metode untuk memberikan hak kepada rakyat dalam menentukan pemimpin mereka dan memastikan tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat adalah prinsip yang menjadi landasan dalam kehidupan berdemokrasi. Dalam konteks Republik Indonesia yang telah mengalami perjalanan demokratis selama lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami fluktuasi. Demikian juga dalam pemilu, demokrasi merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi, dimana kepemimpinan kolaboratif menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Astuti, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya meningkatkan integritas pemilu dan memperkuat sistem demokrasi, kerja sama antara berbagai pihak dalam kepemimpinan kolaboratif adalah esensial.

Demokrasi yang mencerminkan partisipasi rakyat, telah menjadi dasar bagi berbagai sistem politik di seluruh dunia. Namun, tantangan kompleks seperti polarisasi politik, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana demokrasi dapat memberikan solusi yang berkelanjutan. Memahami secara mendalam bagaimana kebijakan publik dapat memperkuat atau melemahkan dasar demokrasi menjadi sangat penting. Untuk membangun fondasi demokrasi yang kuat, sangat penting untuk memilih kebijakan yang transparan, inklusif, dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah untuk menjelajahi hubungan dinamis antara kebijakan publik dan keberlanjutan demokrasi. Di samping itu, politik hukum memiliki peran sentral dalam membentuk kerangka hukum yang mendukung demokrasi. Melalui analisis mendalam terhadap peran institusi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam sistem hukum, penelitian ini akan menggali bagaimana politik hukum

dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat dasar demokrasi atau, sebaliknya, dapat menjadi hambatan bagi partisipasi rakyat (Muhammad *et al.*, 2023).

Demokrasi yang berkelanjutan dengan kepemimpinan kolaboratif dalam pemilu 2024 sangat penting karena memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan, meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, menjaga stabilitas politik, mendorong inovasi, serta pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga memungkinkan negara untuk mengatasi tantangan global dan melindungi hak asasi manusia dengan lebih baik, sambil meningkatkan kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Demokrasi yang berfungsi baik dengan kepemimpinan kolaboratif menciptakan dasar yang kokoh untuk mencapai kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat baik secara lokal maupun global.

Demokrasi berkelanjutan adalah pondasi yang krusial dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan yang berkelanjutan. Ini melibatkan pengakuan hak asasi manusia sebagai nilai inti dan memerlukan kapasitas institusi yang ditingkatkan. Selain itu, budaya toleransi, dialog antar-kelompok, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat menjadi unsur penting dalam membangun persatuan dalam masyarakat yang beragam. Selama pemilu, integritas, transparansi, dan pengakuan terhadap hasil pemilihan merupakan elemen-elemen kunci dalam menjaga demokrasi yang berkelanjutan. Demokrasi yang berkelanjutan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan dan praktik-praktik demokratis, sehingga menjaga kesehatan sistem demokrasi dan memastikan perkembangan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

(Muhammad *et al.*, 2023) juga menerangkan bahwa konsep demokrasi berkelanjutan adalah konsep yang telah diintegrasikan, menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan keberlanjutan, sehingga menciptakan kerangka kerja yang mendorong partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengakuan dalam konsep ini adalah bahwa demokrasi yang sehat dan berkelanjutan tidak hanya melibatkan aspek politik, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Prinsip kesetaraan dan keadilan ditekankan dalam demokrasi berkelanjutan, di mana hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi diberikan kepada setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi (Mangkurat, 2021). Prinsip ini juga diterapkan dalam distribusi sumber daya dan manfaat ekonomi guna mencapai keadilan sosial. Partisipasi publik yang luas dan transparansi dijadikan sebagai pijakan utama dalam demokrasi berkelanjutan (Melati & Asmorowati, 2023). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka didorong, dan komitmen untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pemerintah (inisiatif ini) dilakukan. Dengan demikian, lingkungan

diciptakan di mana kebijakan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam jurnal ini, penulis akan mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan kolaboratif serta demokrasi berkelanjutan dapat terkait dengan momentum pemilu 2024. Penulis akan membahas beberapa aspek penting dari kepemimpinan kolaboratif yang dapat digunakan untuk memastikan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Selain itu, penulis akan membahas mengapa keterlibatan berbagai pihak dalam proses pemilu dapat memperkuat integritas dan legitimasi pemilu tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu deskriptif kualitatif dengan studi literatur, yaitu penelitian kepustakaan mempelajari data dari berbagai buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut guna memberikan landasan teori terhadap permasalahan yang diteliti, menyatakan bahwa hal tersebut benar adanya (Sarwono, 2006). Studi literatur disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan. Penelitian ini didasarkan pada buku, jurnal nasional, atau artikel atau disertasi sebelumnya yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini.

2. Pembahasan

Pemilu 2024 diharapkan menjadi momen penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, di mana partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak diharapkan akan membawa perubahan positif dan pembangunan yang inklusif untuk masa depan negara. Terdapat berbagai aspek penting yang menunjukkan keterhubungan antara kepemimpinan kolaboratif dengan pemilu 2024. Aspek-aspek tersebut bermula dari adanya hak memilih pemimpin bagi warga Indonesia dalam menentukan masa depan.

(Awaliah *et al.*, 2023) menyebutkan dalam jurnalnya bahwa hak memilih merupakan pilar kunci dalam sistem demokrasi yang dianugerahkan kepada seluruh warga negara, termasuk mereka yang baru pertama kali memilih. Hak ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh signifikan terhadap negara, menjadi salah satu bentuk aplikasi praktis dari proses demokrasi itu sendiri. Sehingga dapat diartikan bahwa pentingnya pemilu yang dijalankan dengan integritas dan profesionalisme. Ini mencakup penyelenggara pemilu yang harus mandiri dan profesional, serta peserta pemilu yang taat aturan. Ini bukan hanya soal merebut kekuasaan tetapi juga untuk menyampaikan visi, misi, dan program yang dapat mensejahterakan masyarakat. Pemilih juga harus cerdas dan tidak terjebak dalam politik transaksional atau uang.

Dalam konteks ini, pentingnya aspek kolaborasi dan sinergi antara penyelenggara Pemilu dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah tindakan curang dalam pemilihan umum juga sangat diperlukan. Pendekatan collaborative governance merupakan suatu konsep yang mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah terkait pemilu dengan cara yang melibatkan pemangku kepentingan

yang saling percaya dan berkomitmen untuk mencapai konsensus. Proses kolaboratif ini melibatkan beberapa langkah, seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, mencapai pemahaman bersama, dan mencapai hasil sementara. Selain itu, diperlukan norma hukum yang mengatur kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk memperkuat prinsip-prinsip collaborative governance (Teka, 2021). Maka dari itu dapat diartikan bahwa kolaborasi antar-stakeholder di pemilu 2024 menjadi kunci untuk pemilu yang damai, tertib, dan berintegritas. Ini termasuk kolaborasi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan instansi pemerintah. Bawaslu menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilu, yang melibatkan ormas, OKP, dan pemantau pemilu sebagai 'mata dan telinga' Bawaslu. Deklarasi patuh dan taat pada aturan pemilu menjadi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Aspek penting lainnya yang perlu diketahui pada pemilu 2024, terdapat generasi baru yang akan banyak berpartisipasi pada pemilu yaitu yang dikenal sebagai generasi Z. Berdasarkan hasil penelitian (Evita, 2023), dalam kelompok generasi Z ini, sebanyak 60,60 persen dari Generasi Z menganggap Pemilu 2024 memiliki tingkat penting yang tinggi. Sebaliknya, 20,57 persen dari mereka merasa netral dan 18,83 persen menganggapnya tidak penting. Melalui wawancara mendalam, mereka menjelaskan mengapa mereka begitu memandang Pemilu 2024 sebagai suatu hal yang penting. Salah satu alasan utama yang membuat mereka percaya pemilu penting karena pemilihan pemimpin dalam Pemilu 2024 memiliki dampak besar pada fondasi negara dan akan mempengaruhi arah masa depan negara ini. Adapun, menurut survei Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS, 2023), karakter pemimpin yang disukai oleh pemilih muda di Pilpres 2024, pemilih muda di Indonesia menyukai pemimpin yang jujur, tidak korupsi, merakyat, sederhana, tegas, berwibawa, memiliki prestasi atau kinerja yang baik saat memimpin, berpengalaman dalam memimpin, cakap dalam memimpin, taat beragama, dan cerdas. Pemilih muda ini diharapkan akan memainkan peran penting dalam menentukan arah dukungan atau pilihan dalam pemilu, dengan perhatian khusus pada isu-isu seperti kesehatan, lingkungan, ketenagakerjaan, demokrasi, dan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan penjelasan aspek-aspek tersebut, maka Pemilu 2024 di Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam konteks perkembangan demokrasi karena mencerminkan pentingnya kepemimpinan kolaboratif dalam proses demokrasi. Ketika generasi muda, seperti Generasi Z, semakin sadar akan pentingnya hak memilih dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, hal ini mencerminkan kedewasaan dan kesadaran demokrasi dalam masyarakat. Kepemimpinan kolaboratif berperan aktif pada kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses demokrasi, termasuk pemilih baru, penyelenggara pemilu, dan pemimpin yang terpilih. Ketika generasi muda dan

semua pemangku kepentingan bersatu untuk mengambil peran aktif dalam proses pemilu dan memastikan bahwa pemilihan pemimpin dilakukan dengan integritas dan kejujuran, maka demokrasi akan tumbuh dan berkembang, menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi negara ini. Oleh karena itu, Pemilu 2024 di Indonesia menjadi peluang untuk menggambarkan bagaimana kepemimpinan kolaboratif dapat menjadi pilar utama dalam perkembangan demokrasi.

Kepemimpinan kolaboratif dan demokrasi berkelanjutan memainkan peran kunci dalam konteks pemilu 2024. Kepemimpinan kolaboratif berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu, sementara demokrasi berkelanjutan memastikan pemilu berlangsung dengan integritas, kejujuran, dan transparansi yang tinggi. Kepemimpinan kolaboratif dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai aspek persiapan dan pelaksanaan pemilu. Misalnya, melalui kampanye edukasi pemilu, dialog publik, dan pemantauan pemilu, kepemimpinan kolaboratif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak suara mereka dan mengajak mereka untuk mengambil bagian aktif dalam proses pemilu.

Sementara itu, demokrasi berkelanjutan memastikan bahwa pemilu dijalankan dengan cara yang adil dan transparan. Hal ini bisa dicapai dengan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kolaborasi antara lembaga-lembaga ini, serta dengan berbagai pihak termasuk media massa dan organisasi masyarakat sipil, dapat meningkatkan transparansi dalam proses pemilu dan meminimalkan potensi pelanggaran.

Sebagai contoh, KPU dan Bawaslu telah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan media massa untuk mengadakan kampanye edukasi pemilu yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilu dan hak suara mereka. Selain itu, mereka juga telah bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi tentang proses pemilu disajikan secara lengkap dan akurat kepada masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil penelitian Samangun dkk (2023) yang menunjukkan bahwa Bawaslu di Kabupaten Maluku Barat Daya telah menjalankan fungsi pemantauan kinerja dalam proses pemungutan suara dengan tingkat efektivitas yang optimal. Di samping itu, DKPP telah bekerja sama dengan berbagai lembaga negara untuk memperkuat penegakan hukum dalam pemilu, dengan tujuan mencegah pelanggaran pemilu dan menjaga integritasnya.

3. Kesimpulan

Pemilu 2024 di Indonesia diharapkan menjadi momen penting dalam perkembangan demokrasi di negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek penting yang terkait dengan pemilu ini, termasuk hak memilih sebagai pilar kunci dalam demokrasi,

pentingnya kolaborasi dan sinergi antara penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan, serta peran generasi muda, terutama Generasi Z, dalam pemilu ini. Pemilu 2024 diharapkan mencerminkan kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan semua pihak, termasuk pemilih, penyelenggara pemilu, dan pemimpin yang terpilih. Kepemimpinan kolaboratif bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu melalui berbagai cara, seperti kampanye edukasi dan dialog publik. Selain itu, demokrasi berkelanjutan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan integritas dan transparansi yang tinggi. Ini melibatkan peran lembaga-lembaga demokrasi, seperti KPU dan Bawaslu, yang bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan media massa untuk memastikan informasi yang akurat dan lengkap tentang proses pemilu disampaikan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kolaborasi antara kepemimpinan kolaboratif dan demokrasi berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pemilu 2024 di Indonesia, yang akan membawa perubahan positif dan pembangunan inklusif untuk masa depan negara.

Daftar Pustaka

- Astuti, N. F. (2020, November 3). *Macam-macam Demokrasi di Indonesia*, dari Parlemerter hingga Pancasila | merdeka.com. Merdeka. Diakses pada tanggal 17 November, 2023
- Awaliah, A. F., Rahmawati, F., Fadilah, J., Lisda, Judatama, M. N., Syahbani, M. R., Fitriah, N., Solihin, S., Kartini, S., & Firliandoko, R. (2023). *Mendorong Partisipasi Politik : Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif*. *Jurnal Karimah Tauhid*, 2(4), 1087–1092.
- Centre for Strategic and International Studies. (2023). Diakses melalui : <https://www.csis.or.id/publication/pemilih-muda-dalam-pemilihan-umum-2024-dinamis-adaptif-dan-responsif/>
- Evita, N. (2023). *Generasi Z Dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik*. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 47–66.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). *Legal Discourse: The Spirit of Democracy and Human Rights Post Simultaneous Regional Elections 2020 in the Covid-19 Pandemic Era*. *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 97–118. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.45887>
- Mangkurat, R. S. B., & Mirajiah, R. (2021). *Politik Kontemporer : Tantangan dan Prospek dalam membangun Demokrasi yang Berkelanjutan*. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(2), 135–171.

- Marayasa, I. N., Yuangga, K. D., Ahidin, U., Sugiarti, E., & Kencana, P. N. (2020). Pelatihan Dasar Kepemimpinan Taman Belajar Kreatif Mekarsari Kabupaten Bogor Jawa Barat. *BAKTIMAS : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 77–80.
- Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Presfektif Kebijakan Publik. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 257.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., Hasrul, M., & Aci, L. (2023). Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(4), 354–368.
- Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. LL Sekretariat Negara. Jakarta
- Ramadhan, M. N. (2021). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 115–127.
- Riadhussyah, M., Farhan, F., Hamdani, F., & Nata Kusuma, L. A. (2022). The Dignity of Democracy in the Appointment of Acting Regional Heads by the President: Legal Construction After the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022. *Jurnal Jurisprudence*, 12(1), 106–119. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i1.1044>
- Samangun, O., Rengifurwarin, Z. A., & Sahetapy, P. (2023). Kinerja Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(2), 102-114.
- Saleh, Z. A. (2008). Demokrasi dan partai politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 56–80.
- Supriyanto, D., & Pratama, H. (2020). Pengantar Aktor Pemilu. In *Aktor pemilu*.
- Tampubolon, P. (2018). Pengorganisasian dan Kepemimpinan : Kajian Terhadap Fungsi-fungsi Manajemen Organisasi dalam Upaya untuk Mencapai Tujuan Organisasi. *Jurnal STINDO Profesional*, 4(3), 22.
- Teka, S. S. (2021). Urgensi Desain Collaborative Governance dalam Pemilu dan Pilkada (Studi Kasus Malpraktik Elektoral Tahapan Pencalonan Pemilu DPRD Provinsi NTT dan Pilkada Sabu Raijua) The Urgency of Collaborative Governance Design in Elections and Pilkada (Case Study of. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 1–27.